



Kondisi Politik & Keamanan Pasca Pemilu Tahun 2024 Menurut Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Dalam Pembangunan Demokrasi Substantif

Keisha Rafilah Putri¹, Shabiya Zahra Alifa Koesnaedy², Devyta Ardiyaning Azz Zahra³, Ranti Angelina⁴, Daffania Aldhiyata⁵, Shabrina Rifdah Larasati⁶, Muhammad Sultan Mandalika⁷, Rifa Fadhilahtun Nisa⁸, Timothy Putra Natama Parulian Siregar⁹, Natanael Robona Asimi Siagian¹⁰, Subakdi¹¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Abstract

Received: 3 September 2024
Revised: 14 September 2024
Accepted: 28 September 2024

In the context of the general election conducted in 2024, the South Jakarta Regional General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan) emphasises the importance of maintaining a conducive political and security environment to ensure the democratic process runs smoothly. According to the South Jakarta Regional General Elections Commission, the political and security situation during the 2024 election is expected to be better compared to previous elections. This is based on the absence of excessive political identity campaigns, which were prevalent in previous elections. To build a more substantial democracy, South Jakarta Regional General Elections Commission focuses on strict monitoring of the election process. This approach aims to prevent chaos and ensure a fair, direct, general, clean, honest, and just election. In this context, the South Jakarta Regional General Elections Commission also highlights the crucial role of political parties and public participation in building a more substantial democracy. Political parties must have effective mechanisms to channel public aspirations and avoid transactions that can disrupt the democratic process. Public participation in the 2024 election also plays a significant factor in the success of the election, aligning with the broader public's aspirations. Therefore, the South Jakarta Regional General Elections Commission hopes to achieve the best leaders needed by society in the 2024 simultaneous general election.

Keywords: Substantive Democracy, General Election, General Elections Commission.

(*) Corresponding Author:

¹2310611210@mahasiswa.upnvj.ac.id ²2310611212@mahasiswa.upnvj.ac.id
³2310611216@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴2310611226@mahasiswa.upnvj.ac.id
⁵2310611408@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁶2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id
⁷2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁸2310611439@mahasiswa.upnvj.ac.id
⁹2310611455@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹⁰2310611475@mahasiswa.upnvj.ac.id
¹¹subakdi@upnvj.ac.id

How to Cite: Putri, K., Koesnaedy, S., Azz Zahra, D., Angelina, R., Aldhiyata, D., Larasati, S., Mandalika, M., Nisa, R., Siregar, T., Siagian, N., & Subakdi, S. (2024). Kondisi Politik & Keamanan Pasca Pemilu Tahun 2024 Menurut Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Dalam Pembangunan Demokrasi Substantif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 656-664. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9464>

PENDAHULUAN

Pemilu adalah titik penting dalam proses demokratisasi suatu negara. Setiap kali pemilihan umum diadakan, itu bukan hanya untuk memilih pemimpin baru tetapi juga sebagai salah satu indikator kesehatan demokrasi suatu negara. Sama halnya dengan negara lain, hal ini juga berlaku di Indonesia, terutama di Kota Jakarta Selatan yang merupakan salah satu pusat aktivitas politik dan ekonomi di Indonesia. Pemilu tahun 2024 telah menjadi sorotan publik, bukan hanya karena dinamika politik yang berkembang, tetapi juga karena banyaknya perubahan yang signifikan dalam perspektif

politik dan keamanan pasca-pemilihan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan) Kota Jakarta Selatan memiliki peran yang krusial dalam mengawal proses demokrasi, tidak hanya selama pemilihan, tetapi juga dalam pasca-pemilu. Dalam konteks dalam pembangunan demokrasi substantif. Penting untuk memahami bagaimana kondisi politik dan keamanan pasca-pemilu tahun 2024 yang telah dipandang oleh Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan) Kota Jakarta Selatan. Analisis dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan) Kota Jakarta Selatan menjadi hal yang sangat penting karena lembaga ini memiliki wawasan dalam terkait dinamika politik lokal, tantangan keamanan, serta upaya untuk memperkuat fondasi demokrasi ditingkat lokal. Dalam Pendahuluan ini kita akan mengulas kondisi politik dan keamanan pasca-pemilu tahun 2024 dari perspektif Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan) Kota Jakarta Selatan, serta relevansinya terhadap upaya dalam pembangunan demokrasi substantif ditingkat lokal. Hasil dari paparan analisis diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik lokal pasca-pemilu, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas keamanan di Kota Jakarta Selatan.

Tujuan

Tujuan dari artikel dengan judul “Kondisi Politik & Keamanan Pasca Pemilu Tahun 2024 Menurut Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Selatan Dalam Pembangunan Demokrasi Substantif” adalah untuk melakukan analisis terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 sebagai salah satu bentuk identifikasi potensi konflik dan tantangan yang dapat muncul pasca pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pemahaman peran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam pembangunan demokrasi substantif juga menjadi salah satu tujuan dari pembentukan artikel ini dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi dan program serta tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum kota Jakarta Selatan dalam membangun nilai demokrasi substantif dan meninjau ulang kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan hak-hak politik pasca pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Penyediaan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan individu lain yang memiliki kepentingan terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kota Jakarta Selatan.

Urgensi Penelitian

Artikel dengan judul “Kondisi Politik & Keamanan Pasca Pemilu Tahun 2024 Menurut Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Selatan Dalam Pembangunan Demokrasi Substantif” sangatlah penting terkait dengan kondisi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sedang hangat dibicarakan oleh semua orang di Indonesia. Artikel ini membahas lebih dalam mengenai fenomena Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berisi mengenai kondisi politik dan demokrasi pasca Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam konteks demokrasi yang lebih substantif di wilayah Jakarta Selatan yang berbasis pada gagasan dan ide. Momen Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan salah satu momen yang krusial bagi Warga Negara Indonesia dalam konteks konsolidasi demokrasi Indonesia dalam segi pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam segi keamanan dan politik pasca Pemilihan Umum

sebagai bagian dari upaya pembentukan konsolidasi demokrasi yang lebih stabil, berkualitas, dan berintegritas.

Proses Pemilihan Umum juga tidak terlepas dari peran Partai Politik yang seharusnya memiliki mekanisme untuk menyampaikan apa saja aspirasi yang dimiliki oleh rakyat serta penghindaran transaksi kepentingan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Disinilah peran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dapat diuji serta diawasi dalam konteks pengawasan dan pengendalian proses Pemilihan Umum demi memastikan keberlangsungan dan kebersihan pesta politik terbesar di negara ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi Substantif, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)

Demokrasi Substantif

Negara berdasarkan hukum adalah salah satu ciri dari Negara demokrasi. Kokohnya perkembangan hukum berteguh pada pilar perkembangan bangsa dan negara. Terdapat banyak perbedaan yang terletak diantara masa dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Banyaknya perbedaan memunculkan berbagai konsekuensi terhadap perkembangan demokrasi dan hukum (Gadug, 2015) .

Dalam demokrasi substantif mengusungkan kehendak masyarakat untuk mengekspresikan demokrasi yang paling dalam tanpa adanya perhitungan kalkulasi suara. Hal tersebut dikehendaki masyarakat lokal yang terkait dengan tatanan adat, serta bilik politik yang beradadi ruang demokrasi administratif.

Sementara demokrasi substantif bergerak dalam ruang budaya (Faidah, 2018). Jadi pada dasarnya demokrasi substantif adalah demokrasi yang mengedepankan pada kepentingan rakyat, dan dampak dampak yang ditimbulkan juga untuk rakyat itu sendiri. Pada demokrasi substantif rakyat memiliki peran penting, tidak hanya untuk memilih namun juga turut ikut serta dalam pengambilan Keputusan dan kebijakan.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana atau proses demokrasi dengan memilih badan legislatif serta presiden dan wakil presiden langsung oleh masyarakat sebagai wakil rakyat dan pejabat pemerintahan guna merealisasikan kedaulatan suatu negara. Pemilihan umum menjadi peranan penting dalam mekanisme pemerintahan demokrasi modern yang mencerminkan keinginan rakyat dalam berpartisipasi untuk menentukan suara dalam memilih pemimpin dan kebijakan suatu negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan (Annisa, 2023). Adapun asas pemilu ada enam, yaitu: "LUBER JURDIL" (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Sedang prinsip Pemilu ada 11, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum atau dapat disingkat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan adalah badan independen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengaturan proses Pemilihan Umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum memegang peran yang sangat besar dalam proses Pemilihan Umum, antara lain dalam pengawasan proses Pemilihan Umum, termasuk

dalam pengawasan kampanye, pengawasan proses pemungutan suara, dan pengawasan hasil pemilihan. Hal ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum demi terciptanya kondisi demokrasi yang jujur dan bersih.

Dalam pengembangan proses demokrasi, Komisi Pemilihan Umum mengedepankan partisipasi masyarakat dan memiliki visi misi yang satu jalan dengan pengembangan nilai demokrasi yang lebih substantif yang berbasis pada gagasan dan ide.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif, melakukan pendekatan dengan mengumpulkan objek berupa kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka (Moleong, 2005 : 4).

Memperoleh data dari hasil wawancara, video tape, foto, catatan lapangan, berbagai dokumentasi pribadi berbentuk memo atau catatan dan bahkan dokumentasi lainnya.

Penelitian kualitatif deskriptif mengandung perspektif paham dimana peristiwa penyimpangan sosial yang telah terjadi di masyarakat. Penelitian dengan menggunakan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena yang telah terjadi di suatu masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif kita dapat memecahkan suatu masalah yang sedang dikaji serta mengungkap fakta-fakta nyata yang ada di lapangan dan jelas dalam masyarakat.

Langkah-langkah penelitian telah diselesaikan dalam penelitian ini adalah: 1) merumuskan masalah penelitian; 2) menentukan kajian literatur; 3) memilih metode pengumpulan data dengan wawancara; 4) mengumpulkan informasi; 5) pemeriksaan informasi instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi adalah survei dengan media google structure. Informasi digali dengan memakai instrumen yang berisi pertanyaan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Selatan.

Berikut adalah tahapan riset yang berlangsung: 1) menentukan topik penelitian yang terukur jelas dengan proses penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Jakarta Selatan; 2) merumuskan pertanyaan instrumen penelitian; 3) memodifikasi instrumen; 4) menyiapkan alat perekam, menentukan waktu & tempat wawancara; 5) membangun rapport dengan pewawancara; 6) melakukan wawancara; 7) mentranskripsikan hasil rekaman wawancara dalam bentuk laporan.

Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian ditetapkan dan berlangsung di Kantor KPU Kota Jakarta Selatan dan wawancara dengan Ketua KPU Kota Jakarta Selatan diselenggarakan di SMK 41 Pondok Labu Jakarta Selatan. Mengenai waktu pelaksanaan penelitian sekiranya dilakukan pada bulan Mei 2023. Hasil wawancara yang akan digunakan untuk pengkajian mengenai kondisi politik & keamanan pemilu menurut sudut pandang KPU Kota Jakarta Selatan.

Perancangan Pertanyaan

Metode pengumpulan data yang akan kita gunakan sangat amat bergantung pada hasil wawancara yang berisikan pendapat, aspirasi, serta pengalaman yang ditempuh oleh KPU Kota Jakarta Selatan. Susunan pertanyaan yang diajukan untuk Ketua KPU Kota Jakarta Selatan sebagai berikut:

- Bagaimana pandangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan terhadap dinamika politik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya dalam hal

pembentukan koalisi pemerintahan dan oposisi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas politik jangka panjang?

- Menurut pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang seharusnya bersifat netral saat pelaksanaan pemilu kemarin, apakah pemilih pemula mampu mempersepsikan dan merespons situasi politik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, terutama dalam hal penanganan konflik politik dan penegakan hukum, serta bagaimana pandangan mereka dapat memengaruhi legitimasi institusi demokratis?
- Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam proses politik pasca pemilu, khususnya dalam hal pendidikan politik, penggunaan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan pemilih pemula dalam proses politik pada tahun 2029?
- Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik pasca-pemilihan, terutama dalam hal pemantauan pelaksanaan keputusan politik dan penanganan sengketa pemilihan?
- Bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengatasi tantangan informasi palsu / hoax yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih pemula terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengedukasi?
- Kemarin sempat membuat heboh masyarakat tentang manipulasi data pemilih, menurut dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sendiri bagaimana tanggapan atas manipulasi data tersebut? dikarenakan berita tersebut sudah mempengaruhi persepsi publik terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
- Bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengevaluasi terkait dengan hasil Pemilihan Umum di wilayah Kota Jakarta Selatan?
- Apa cara yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah, dan masyarakat untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang dapat muncul pada kondisi pasca pemilihan umum yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia?

Kedelapan pertanyaan tersebut terinspirasi dari berbagai studi literatur dan ilmiah yang telah ditempuh. Pertanyaan tersebut diajukan untuk memberikan informasi terakurat untuk mengetahui kondisi dan situasi terkini terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mewawancarai Bapak Muhammad Taqiyuddin selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

Hasil Penelitian

Bagaimana pandangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan terhadap dinamika politik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya dalam hal pembentukan koalisi pemerintahan dan oposisi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas politik jangka panjang?

Menurut Bapak Muhammad Taqiyuddin yang berperan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, kondisi kewilayahan pasca momen Pemilihan Umum di wilayah Kota Jakarta Selatan dapat dikatakan cukup kondusif dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sudah menjalankan tahapan dan koordinasi dengan berbagai unsur yang ada yaitu unsur pemerintahan, dan unsur kemasyarakatan yang menyebabkan kondisi kewilayahan di wilayah Kota Jakarta Selatan terbilang cukup kondusif serta keputusan hasil pemilu yang ditetapkan

Mahkamah Konstitusi terbilang memuaskan dan tidak mengganggu stabilitas yang ada di wilayah Kota Jakarta Selatan.

Menurut pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang seharusnya bersifat netral saat pelaksanaan pemilu kemarin, apakah pemilih pemula mampu mempersepsikan dan merespons situasi politik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, terutama dalam hal penanganan konflik politik dan penegakan hukum, serta bagaimana pandangan mereka dapat memengaruhi legitimasi institusi demokratis?

Menurut informasi yang di dapatkan dari Bapak Muhammad Taqiyuddin, pada proses Pemilihan Umum Tahun 2024 kali ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta selatan hanya berkewajiban menyelenggarakan tahapan tahapan Pemilihan Umum, namun jika dilihat dari sudut pandang atau sisi daripada pemilih, petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tidak mendalami informasi tersebut, karena yang berperan sebagai pemilih adalah para pemilih itu sendiri.

Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam proses politik pasca pemilu, khususnya dalam hal pendidikan politik, penggunaan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan pemilih pemula dalam proses politik pada tahun 2029?

Informasi yang didapatkan dari Bapak Muhammad Taqiyuddin, pada proses Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa tahapan sosialisasi di beberapa tempat, khususnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula seperti di Sekolah Menengah Atas karena kebanyakan murid yang berada di Sekolah Menengah Atas telah berusia di atas usia 17 tahun dan sudah cukup umur untuk mengikuti proses Pemilihan Umum, yaitu rata-rata terdapat pada siswa dan siswi kelas 2 dan 3 dikarenakan siswa kelas 2 dan 3 memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemilih pemula. Selain mengunjungi sekolah-sekolah guna melaksanakan sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan juga mensosialisasikan mengenai proses Pemilihan Umum kepada masyarakat luas dan beberapa universitas di sekitaran wilayah Jakarta Selatan karena dapat diketahui pada basis data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan bahwa banyak pemilih yang berusia diatas 17 tahun, oleh karena itu persentase pemilih pemula bukan hanya pemula, melainkan persentase banyaknya pemilih pemula yang ada terdapat lebih dari 50% dari banyaknya pemilih yang ada di wilayah Kota Jakarta Selatan.

Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik pasca-pemilihan, terutama dalam hal pemantauan pelaksanaan keputusan politik dan penanganan sengketa pemilihan?

Akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip yang dimiliki oleh lembaga, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan selalu mengarsipkan dan mengadministrasikan setiap langkah-langkah dan keputusan yang dijalankan demi terciptanya kondisi yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi di wilayah Kota Jakarta Selatan. Sebagai contoh, pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Jakarta Selatan, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, semua dicatat di dalam rapat pleno terbuka, yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan jika terdapat sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi. Secara transparan, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melaksanakan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan secara terbuka, yang

menghadirkan banyak saksi, media, dan masyarakat umum. Bahkan di tingkat Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melaksanakan rapat rekapitulasi secara live melalui akun youtube Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, dengan begitu sudah menjawab asas atau prinsip transparansi.

Bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengatasi tantangan informasi palsu / hoax yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih pemula terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengedukasi?

Berdasarkan proses Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan selalu menginformasikan melalui media-media resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Jakarta Selatan, di media sosial maupun media konvensional.

Untuk menangkal hoax dan informasi palsu di wilayah Kota Jakarta selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan selalu mengarahkan masyarakat untuk mengambil sumber yang pasti melalui website Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan atau media sosial resmi. Untuk sosialisasi di daerah Jakarta selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menyambangi setiap Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan dan menginformasikan secara luas tahapan-tahapan yang sedang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan jalankan.

Lalu untuk menangkal hoax atau informasi palsu yang muncul setelah pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengimbau masyarakat sekitar wilayah Kota Jakarta Selatan untuk melihat media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Jakarta selatan, dan hasil akuntabilitas dan transparan yang ada di poin sebelumnya, menunggu hasil proses Pemilihan Umum yang transparan memakan cukup banyak waktu, tetapi secara konkrit informasi tersebut menjadi valid. Memang banyak informasi yang menyebar di masyarakat baik dari paslon A, B, atau C yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dikarenakan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan masih memiliki tahapan-tahapan yang dijalankan, contohnya Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sudah menetapkan atau merekap hasil dari tingkat Tempat Pemungutan Suara sampai ke tingkat Provinsi akan tetapi hasil dari proses Pemilihan Umum masih tetap harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan sebelum dikeluarkannya keputusan hasil akhir dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan belum bisa mengeluarkan hasil keputusan apapun kepada masyarakat luas terlebih di wilayah Kota Jakarta Selatan.

Kemarin sempat membuat heboh masyarakat tentang manipulasi data pemilih, menurut dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sendiri bagaimana tanggapan atas manipulasi data tersebut? dikarenakan berita tersebut sudah mempengaruhi persepsi publik terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Menurut Bapak Taqiyuddin, beberapa waktu lalu memang kota Jakarta Selatan sempat dihebohkan dengan hasil-hasil yang keluar dari aplikasi pendukung Komisi Pemilihan Umum untuk pengumpulan data-data maupun hasil-hasil dari tingkat Tempat Pemungutan Suara yaitu aplikasi Sirekap. Hasil-hasil yang sempat menggemparkan mungkin sudah menyebar luas di masyarakat walau Komisi Pemilihan Umum memiliki aplikasi pendukung resmi untuk rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara sampai di tingkat nasional, tetapi sempat terjadi kekeliruan hasil inputan yang ada di aplikasi Sirekap, dikarenakan aplikasi Sirekap ini

menggunakan teknologi yang memiliki basis AI (Artificial Intelligence) yang membaca tulisan hasil pemilihan dari teman-teman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, memang ada sedikit kelemahan dan kesalahan dalam membaca Artificial Intelligence tersebut sehingga angka-angka yang masuk ke dalam aplikasi Sirekap menjadi tidak sesuai dengan yang dituliskan oleh teman-teman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dikarenakan sistem teknologi yang dibuat oleh manusia mungkin memang berpotensi untuk menimbulkan kesalahan-kesalahan seperti tulisan hasil pemilihan menjadi tidak terbaca secara maksimal, hal tersebut yang membuat masyarakat menjadi gaduh sehingga persepsi terhadap Komisi Pemilihan Umum menjadi menurun.

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berharap kepada masyarakat, bahwa yang dijalankan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, dan Aplikasi Sirekap hanya menjadi alat bantu untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk menjalankan tugas, akantetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tidak menjadikan Sirekap ini sebagai patokan, melainkan yang dijadikan patokan untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu hasil hard copy atau hasil tulisan asli dari Tempat Pemungutan Suara masing-masing wilayah, dan hasil rekapan dikumpulkan secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengevaluasi terkait dengan hasil Pemilihan Umum di wilayah Kota Jakarta Selatan?

Jika dilihat dari keseluruhan hasil pemilihan di wilayah Kota Jakarta Selatan dari pelaksanaan sosialisasi sampai dengan tahapan Pemilihan Umum sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, tetapi memang dengan adanya tahapan yang masih perlu dievaluasi, salah satunya adalah dengan adanya partisipasi yang mungkin masih bisa dilaksanakan dengan sosialisasi kembali ke semua tataran generasi di wilayah Kota Jakarta Selatan tidak hanya ke pemilih pemula, intinya sosialisasi mengenai momen Pemilihan Umum harus dimaksimalkan.

Pelaksanaan saat hari dimana Pemilihan Umum dilaksanakan banyak masyarakat yang masih tetap bingung dalam memilih calon-calon yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta calon-calon Wakil Rakyat, dikarenakan surat suara tersebut terdapat banyak sekali calon yang mendaftar.

Mungkin hal tersebut bisa dikatakan sebagai dampak dari sosialisasi yang kurang maksimal, namun sebenarnya hal ini berkaitan dengan pendidikan politik masing-masing yang harus dijalankan oleh peserta Pemilihan Umum, dikarenakan petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan hanya membantu mensosialisasikan siapa saja calon-calon yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat, dan hal tersebut akan dicoba lagi untuk dimaksimalkan sebagai bahan evaluasi untuk proses Pemilihan Umum Tahun 2029, agar masyarakat nantinya akan merasa nyaman dan mudah untuk memilih calon-calon yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat.

Apa cara yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah, dan masyarakat untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang dapat muncul pada kondisi pasca pemilihan umum yang **dapat mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia?**

Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Taqiyuddin selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan di awal, bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang ada di wilayah Jakarta Selatan dimulai dari pemerintah Kota lalu

Kepolisian, TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat pun dilibatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Pihak-pihak tersebut saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut dan sudah menginformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat demi terciptanya langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kewilayahan Kota Jakarta Selatan.

Dari simpul-simpul masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang telah berkoordinasi, termasuk dengan adanya tokoh keagamaan, tokoh kebudayaan, tokoh cendekiawan yang memungkinkan terciptanya kondisi yang saling kolaborasi terkait dengan informasi tentang tahapan Pemilihan Umum ke masyarakat, tokoh kepemudaan juga dilibatkan karena banyak pemilih pemula yang bisa mempresentasikan pemuda di wilayah Jakarta Selatan. Tahapan-tahapan tersebut diterapkan pada momen Pemilihan Umum karena dirasa bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tidak dapat bergerak sendiri dalam menjalankan tahapan Pemilihan Umum dan mengharuskan melibatkan banyak lembaga serta masyarakat umum untuk dapat menciptakan kondisi yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, S. (2008). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Kristiadi, J. (ed). *Menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil* (Jakarta: CSIS, 1997).
- Hidayat, Arief. *Efektifitas Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga konstitusi (Perspektif Pembinaan Hukum dan Demokrasi)*, (Makalah disampaikan dalam Continuing Legal Education (CLE) di Puslitbang BPHN, Kementerian Hukum dan HAM-RI, tanggal, 03 Mei 2013 di Jakarta).
- Triana, H. S. Y., Khairina, E., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2023). *Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia*. *Jurnal Transformative*, 9(1), 66-83.
- Heryanto, G. G. (2022). *Mengawal Regularitas dan Menguatkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*. *Jurnal Bawaslu DKI*, 7(3), 51-66